

**ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN
PADA PEMERINTAH KOTA MANADO
(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan
Barang Milik Daerah)**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana Terapan
Pada Program Studi D4 Akuntansi Keuangan**

**Oleh :
Steward A. Kontra
NIM : 11042021**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2015**



POLITEKNIK NEGERI MANADO
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN

PERSETUJUAN

Tugas Akhir dengan judul

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN
PADA PEMERINTAH KOTA MANADO
(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah)

Oleh

Nama : Steward A. Kontra

NIM : 11042021

Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

Disetujui untuk diujikan

Manado, September 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Susi Amelia Marentek, SE.MSA

NIP. 19631230 198903 2 001

Siandwi Sagiman, SE.,MM.Ak

NIP. 19620210 199303 1 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

Jeffry Otniel Rengku, SE,MM.Ak.CA

NIP. 19630924 199403 1 001



POLITEKNIK NEGERI MANADO
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN

PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN PADA PEMERINTAH KOTA MANADO

(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah)

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Tim Penguji Akhir

Pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015, pukul : 10.30 – 12.30 Di Jurusan
Akuntansi.

Oleh

Steward A. Kontra

NIM : 11042021

Dan yang bersangkutan dinyatakan

LULUS

Tim Penguji Akhir

Ketua Sidang Penguji	: Dr. Kiet Tumiwa, SE,MM.Ak NIP. 19690120 199802 1 001
Anggota I	: Alpindos Toweula, SE.,MM.,Ak.CA NIP. 19650508 199403 1 005
Anggota II	: Stevie Kaligis, SE., MM.Ak.CA NIP. 19720415 200212 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Ketua Program Studi
Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

Susy Amelia Marentek, SE,MSA
NIP. 19631230 198903 2 001

Jeffry Otniel Rengku, SE,MM.Ak.CA
NIP. 19630924 199403 1 001

PERNYATAAN ARISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir yang saya buat adalah orisinal, merupakan hasil karya saya sendiri, tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam tugas akhir ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi, saya bersedia tugas akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manado,
Penulis,

Steward A. Kontra
NIM. 11042021

ABSTRAK

Kontra, Steward. 2015. *Analisis Sistem Akuntansi Pembiayaan pada Pemerintah Kota Manado*. Tugas Akhir. Akuntansi. Politeknik Negeri Manado. Pembimbing : Susi Amelia Marentek, SE.MSA. Siandwi Sagiman, SE.,MM.Ak

Penelitian ini membahas penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan pada Pemerintah Kota Manado berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

Penelitian ini dilaksanakan di SKPKD Kota Manado. Data yang digunakan adalah Data Primer dan Data sekunder. Pengumpulan Data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, dan wawancara. Data yang dikumpulkan dibandingkan dan dianalisis dengan analisis kualitatif.

Adapun Temuan dalam penelitian ini yaitu Transaksi Pembiayaan Pengeluaran dan Pembiayaan pengeluaran diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Jurnal untuk transaksi pembiayaan pengeluaran merupakan jurnal corollary. Penjurnalan transaksi pembiayaan pengeluaran dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi pembiayaan terbagi atas penerimaan pembiayaan dan pembiayaan pengeluaran. Selisih dari kedua transaksi tersebut merupakan pembiayaan netto.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Perlakuan akuntansi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan mulai dari pengakuan, pencatatan, pengungkapan secara garis besar sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II, namun masih saja ada terdapat kekurangan dan kelemahan pada pencatatan laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD), khususnya adanya kesalahan pencatatan pada pos SILPA

Kata Kunci : Sistem Akuntansi, Pembiayaan, Pemerintah

BIODATA PENULIS

NAMA : STEWARD A. KONTRA

TEMPAT / TANGGAL LAHIR : MANADO, 17 OKTOBER 1992

JENIS KELAMIN : LAKI - LAKI

AGAMA : KRISTEN

ALAMAT : TELING, TINGKULU.

NO. HP : 082216472009

RIWAYAT PENDIDIKAN : SD NEGERI 78 MANADO

: SMP NEGERI 7 MANADO

: SMA NEGERI 2 MANADO

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan di Politeknik Negeri Manado.

Penulisan Tugas Akhir ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ir. Jimmy Rangan, MT selaku Direktur Politeknik Negeri Manado, beserta para pembantu direktur.
2. Susy Amelia Marentek, SE.,MSA selaku Ketua Jurusan Akuntansi.dan Dosen Pembimbing
3. Ifoletty M. Walukow, SE.,M.Si selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi.
4. Jeffry O. Rengku,SE,MM,Ak.CA selaku Ketua Program studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan.
5. Jerry S. Lintong, SE.,MAP selaku Ketua Panitia Tugas Akhir 2015.
6. Siandwi Sagiman, SE.,MM.Ak selaku Dosen Pembimbing.Tugas Akhir.
7. Seluruh Staff Pengajar/Dosen dan Staff Pegawai Politeknik Negeri Manado Jurusan Akuntansi.
8. Teristimewa terima kasih yang tak terhingga untuk Mama dan Papa yang telah memberikan dukungan dan Doa sampai saat ini.
9. Teman – teman seperjuangan angkatan 2011 Jurusan Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Manado.
10. Pihak – Pihak lain yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu pada kesempatan ini yang turut mengambil bagian dalam proses penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyelesaian penyusunan Tugas Akhir ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Manado, 21 September 2015

Penulis,

Steward A. Kontra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
BIODATA	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Deskripsi teori dan konsep.....	5
1. Akuntansi Sektor Publik.....	5
a. Karakteristik Akuntasn Sektor Publik.....	5
b. Tujuan Akuntansi pemerintah.....	6
2. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	6
3. Akuntansi Pembiayaan	7
a. Pihak – pihak yang terkait	8
4. Akuntansi Pembiayaan penerimaan.....	9
a. Dokumen sumber transaksi pembiayaan penerimaan.	9
b. Standar jurnal transaksi penerimaan pembiayaan.....	10
5. Akuntansi Pembiayaan pengeluaran.....	11
a. Dokumen sumber transaksi pembiayaan pengeluaran	11
b. Standar jurnal transaksi pengeluaran pembiayaan.....	12
6. Akuntansi Pembiayaan Neto.....	13
2.2 Definisi Konsepsional.....	14
2.3 Fokus Penelitian.....	15
2.4 Data yang diperlukan	15

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	16
3.2 Tempat dan waktu penelitian.....	16
3.3 Sumber Data	16
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	17
3.5 Teknik Analisis Data	17
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum.....	18
1. Sejarah Kota Manado	18
a. Struktur Organisasi BEI.....	22
4.2 Hasil Penelitian	23
1. Sistem penerimaan pembiayaan	23
a. Sistem penerimaan Pembiayaan daerah melalui Bendahara Penerimaan PPKD	24
b. Sistem penerimaan melalui Bank Pemerintah yang Ditunjuk	27
2. Sistem Pengeluaran Pembiayaan	28
a. Sitem Pengeluaran Pembiayaan Daerah Melalui Bendahara Pengeluaran PPKD.....	29
3. Perlakuan Akuntansi pembiayaan.....	32
1) Pengakuan	32
a. Penerimaan Pembiayaan	32
b. Pengeluaran Pembiayaan	33
2) Pencatatan	33
a. Penerimaan Pembiayaan	33
b. Pengeluaran Pembiayaan	35
3) Pengungkapan	37
4.3 Pembahasan	38
1. Analisis Terhadap Sistem Penerimaan Pembiayaan	39
2. Analisis Terhadap Sistem Pengeluaran Pembiayaan	39
3. Analisis Terhadap Akuntansi Pembiayaan	40
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	44
5.2 Rekomendasi.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Dokumen Sumber Transaksi Pembiayaan Penerimaan	10
Tabel 2.2	Tabel Standar Jurnal untuk transaksi Pembiayaan Penerimaan	11
Tabel 2.3	Tabel Dokumen Sumber Transaksi Pembiayaan Penerimaan	12
Tabel 2.4	Tabel Standard Jurnal untuk transaksi Pembiayaan Pengeluaran.....	13
Tabel 4.1	Tabel Pembukuan Penerimaan	27
Tabel 4.2	Dokumen Sumber penerimaan yang dikeluarkan.....	33
Tabel 4.3	Dokumen sumber pengeluaran yang dikeluarkan.....	34
Tabel 4.4	Laporan Realisasi anggaran Penerimaan Pembiayaan	35
Tabel 4.5	Jurnal Penerimaan Pembiayaan	35
Tabel 4.6	Laporan Realisasi anggaran Pengeluaran Pembiayaan.....	36
Tabel 4.7	Jurnal Pengeluaran Pembiayaan	37
Tabel 4.8	Tabel Perbandingan	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	15
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Manado	23
Gambar 4.2 Bagan alir prosedur penerimaan pembiayaan melalui BUD.....	27
Gambar 4.3 Bagan alir prosedur pengeluaran pembiayaan pada BPK-BMD ..	32

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Flowchart Pembukuan Bendahara Penerimaan PPKD
- Lampiran 2 Flowchart Pembukuan Bendahara Pengeluaran PPKD
- Lampiran 3 Flowchart Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD
- Lampiran 4 Lembar Konsultasi Pembimbing

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Modernisasi akuntansi keuangan di sektor pemerintah dimulai tahun 1982. hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Berbagai perubahan dan penyempurnaan terus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengembangan system akuntansi pemerintah pusat. Tuntutan demokratisasi menyebabkan sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabilitas.

Aspek yang paling penting yaitu akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang harus segera diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, di antaranya adalah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang terdiri dari akuntansi pendapatan, belanja, pembiayaan dan transaksi non kas. Seluruh pembiayaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi dilakukan sebagai beban APBD. Oleh karena itu seluruh rangkaian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sangatlah berperan penting dalam menerapkan akuntansi pembiayaan yang secara wajar terhadap pemerintah daerah, sehingga menggambarkan posisi pengelolaan keuangan daerah secara jelas dan terarah pada pencapaian tujuan bersama baik pemerintah dan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan organisasi sektor publik khususnya sektor pemerintah daerah, maka tuntutan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pun semakin meningkat. Sehingga dibutuhkan kemampuan dari pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah harus semakin ditingkatkan.

Salah satu hal penting dalam pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah adalah Pembiayaan. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang ditunjukkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Karena Tujuan dari pembiayaan daerah adalah untuk menutupi defisit anggaran jika anggaran pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan anggaran belanja atau menggunakan surplus anggaran jika anggaran pendapatan lebih besar dibandingkan anggaran belanja.

Transaksi Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih dari kedua transaksi tersebut merupakan pembiayaan netto. Transaksi penerimaan pembiayaan berasal dari penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Sedangkan Transaksi pembiayaan pengeluaran berasal dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman (utang) dan pemberian pinjaman daerah.

Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah yang diatur dalam

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Sistem penerimaan dan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk mengatur kegiatan menerima, menyimpan, mengeluarkan atau membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran uang. Hal ini sesuai dengan di tetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya yaitu semua penerimaan pembiayaan daerah yang diterima dari rekening kas daerah harus memiliki nota kredit dan bukti penerimaan sah lainnya.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) memakai Peraturan Walikota Manado Nomor 23 Tahun 2009 tentang sistem dan prosedur penatausahaan keuangan Kota Manado. Penatausahaan penerimaan PPKD di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang berada dalam pengelolaan SKPKD.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 akuntansi pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan dan pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Untuk itu diperlukan perlakuan akuntansi dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Karena selama ini banyak sektor pemerintah yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu penulis ingin meneliti bagaimana penerapan sistem akuntansi pembiayaan pada Badan Pengelola

Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado berdasarkan Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado berdasarkan PP No. 71 tahun 2010.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah khususnya yang terkait dengan pembiayaan.
2. Bagi pembaca, masukan atau referensi dalam penelitian selanjutnya.
3. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana terapan, juga dapat menerapkan ilmu pengetahuan pada saat perkuliahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Deskripsi Teori dan Konsep

1. Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2009:1) menjelaskan bahwa dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

a. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2009: 167) menyebutkan karakteristik akuntansi sektor publik yaitu:

- 1) Pemerintah tidak berorientasi laba
- 2) Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan
- 3) Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana
- 4) Akuntansi pemerintahan membukukan pengeluaran modal seperti untuk membangun gedung, dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasional.
- 5) Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan di neraca.

b. Tujuan Akuntansi Pemerintah

Dilihat dari fungsinya Akuntansi Pemerintah mempunyai beberapa tujuan (Halim : 2012) :

- 1) Pertanggung jawaban, memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat dan tepat bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkualitas dengan operasi unit-unit Pemerintah yang menyusun laporan.
- 2) Manajerial, tujuan ini berarti akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, manfaat, pengendalian, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.
- 3) Pengawasan, yaitu bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggarakannya pemeriksaan oleh aparat pengawas fungsional secara efektif dan efisien.

2. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Pasal 6, PP 8/2006 menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintahan dihasilkan dari suatu sistem akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Dari penerangan sistem akuntansi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua komponen laporan keuangan yang dihasilkan secara langsung dari sistem (proses) akuntansi yaitu neraca dan laporan operasional (LO) atau laporan realisasi anggaran (LRA).

Sementara itu, LAK (laporan arus kas), LPE, LP SAL, dihasilkan melalui analisis dari neraca, LO dan LRA; sementara itu, CaLK nyata-nyata tidak dapat dihasilkan secara langsung (otomatis) dari sistem (proses) akuntansi, karena informasi di dalam CaLK bersifat kuantitatif/keuangan maupun kualitatif/deskriptif. Bahkan informasi dalam CaLK juga mencakup informasi non-akuntansi dan bisa dilengkapi dengan berbagai macam tabel maupun grafik yang dianggap relevan.

Suatu sistem akuntansi pemerintahan setidaknya mengatur mengenai format laporan keuangan, kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi, bagan akun standar, jurnal standar, entitas pelaporan dan entitas akuntansi, dokumen transaksi yang digunakan. Penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) tersebut harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

3. Akuntansi Pembiayaan

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, mendefinisikan Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2008) Tujuan dari pembiayaan daerah adalah untuk menutupi defisit anggaran jika anggaran pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan anggaran belanja atau menggunakan surplus anggaran jika anggaran pendapatan lebih besar dibandingkan anggaran belanja.

Transaksi pembiayaan terbagi atas penerimaan pembiayaan dan pembiayaan pengeluaran. Selisih dari kedua transaksi tersebut merupakan pembiayaan netto.

Transaksi penerimaan pembiayaan berasal dari :

- penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- pencairan dana cadangan
- hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- penerimaan pinjaman daerah
- penerimaan kembali pemberian pinjaman

- penerimaan piutang daerah.

Transaksi pembiayaan pengeluaran berasal dari :

- pembentukan dana cadangan
- penyertaan modal pemerintah daerah
- pembayaran pokok pinjaman (utang)
- pemberian pinjaman daerah.

Transaksi pembiayaan merupakan transaksi yang terjadi di PPKD sebagai Pemda. Hal ini dikarenakan sifat atau tujuan dari dilakukannya transaksi ini, yaitu untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran daerah. Selain itu dalam transaksi pembiayaan, di dalamnya akan melibatkan akun-akun ekuitas dana yang hanya terdapat di dalam neraca Pemda. Oleh karena itu transaksi ini dicatat dan dilaporkan dalam LRA PPKD sebagai Pemda (kantor pusat), yang kemudian akan digabungkan dengan LRA SKPD lainnya, menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

a. Pihak-pihak yang terkait

Pihak – Pihak yang terkait dalam penatausahaan Pembiayaan :

- 1) Fungsi Akuntansi – PPKD, memiliki tugas sbb :
 - a) Mencatat transaksi/kejadian ke Buku Jurnal Umum;
 - b) Memposting jurnal-jurnal ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
 - c) Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LP-SAL, LO, LPE, LAK, Neraca, dan CaLK.
- 2) BUD, melakukan fungsi mengadministrasi transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dengan tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.
- 3) PPKD, memiliki tugas menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK.

4. Akuntansi Pembiayaan Penerimaan

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 “Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.”

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pembiayaan penerimaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.

a. Dokumen Sumber Transaksi Pembiayaan Penerimaan

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat transaksi pembiayaan penerimaan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tabel Dokumen Sumber Transaksi Pembiayaan Penerimaan

NO	Jenis transaksi	Dokumen sumber	Lampiran dokumen Sumber
1.	Penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya	Copy Surat perintah pemindahbukuan	Nota kredit bank
2.	Pencairan dana cadangan	Copy Surat perintah Pemindah bukuan	Nota kredit bank
3.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Bukti Penerimaan pembayaran atau Bukti tanda setor	Nota kredit bank
4.	Penerimaan pinjaman Daerah	- Surat tanda bukti penerimaan/ Bukti transfer - Bukti penjualan obligasi	Nota kredit bank
5.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Surat tanda bukti penerimaan/ Bukti transfer	- Bukti Transfer - Nota kredit bank
6.	Penerimaan piutang Daerah	Surat tanda bukti penerimaan/ Bukti transfer	- Bukti Transfer - Nota kredit bank

Sumber : Data Olahan, 2015

b. Standar Jurnal Transaksi Penerimaan Pembiayaan

Jurnal untuk transaksi penerimaan pembiayaan merupakan jurnal corollary (korolari), di mana satu jurnal akan berpengaruh terhadap Laporan Realisasi Anggaran, dan jurnal lainnya akan mempengaruhi Neraca. Penjurnalan transaksi penerimaan pembiayaan dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD, secara harian berdasarkan urutan kronologis.

Tabel 2.2 Tabel Standar Jurnal untuk transaksi Pembiayaan Penerimaan

Transaksi	Uraian	Debet	Kredit
Penggunaan SiLPA	No entry		
Pencairan Dana Cadangan	Kas di Kas Daerah/Bank	XX	
	- Penerimaan Pembiayaan – Dana Cadangan		XX
	Ekuitas Dana Cadangan –Diinvestasikan dalam dana Cadangan	XX	
	- Dana Cadangan		XX
Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan	Kas di Kas Daerah/Bank	XX	
	- Penerimaan Pembiayaan –Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan		XX
	Ekuitas Dana investasi –Diinvestasikan dalam dana Cadangan	XX	
	- Penyertaan modal pemerintah daerah/Investasi		XX
Penerimaan Pinjamam daerah	Kas di Kas Daerah/Bank	XX	
	- Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan Pinjaman Daerah		XX
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	XX	
	- Utang dari dalam Negeri		XX
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Kas di Kas Daerah/Bank	XX	
	- Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan kembali pemberian Pinjaman		XX
	Ekuitas dana Lancar – Cadangan Piutang	XX	
	- Bagian Lancar Pinjaman		XX
Penerimaan Piutang Daerah	Kas di Kas Daerah/Bank	XX	
	- Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan Piutang Daerah		XX
	Ekuitas dana Lancar – Cadangan Piutang	XX	
	- Piutang		XX

Sumber : Data Olahan, 2015

5. Akuntansi Pembiayaan Pengeluaran

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010, mendefinisikan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut :

“Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.”

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. Pembiayaan Pengeluaran diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

a. Dokumen Sumber Transaksi Pembiayaan Pengeluaran

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat transaksi pengeluaran pembiayaan ini sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tabel Dokumen Sumber Transaksi Pembiayaan Penerimaan

NO	Jenis transaksi	Dokumen sumber	Lampiran dokumen Sumber
1.	Pengisian dana Cadangan	- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - Perda tentang dana Cadangan	- SPD - SPM
2.	Penyertaan modal pemerintah daerah	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	- SPD - SPM
3.	Pembayaran pokok Pinjaman	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	- SPD - SPM
4.	Pemberian pinjaman Daerah	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	- SPD - SPM - Perjanjian Pinjaman

Sumber: Data Olahan, 2015

b. Standar Jurnal Transaksi Pengeluaran Pembiayaan

Jurnal untuk transaksi pembiayaan pengeluaran merupakan jurnal corollary. Penjurnalan transaksi pembiayaan pengeluaran dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD, secara harian berdasarkan urutan kronologis. Standar jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Tabel Standar Jurnal untuk transaksi Pembiayaan Pengeluaran

Transaksi	Uraian	Debet	Kredit
Pengisian Dana Cadangan	Pengeluaran pembiayaan – Pengisian Dana Cadangan	XX	
	- Kas di Kas Daerah / Bank		XX
	Dana Cadangan	XX	
	- Ekuitas dana cadangan-Diinvestasikan dalam dana cadangan		XX
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Pengeluaran pembiayaan – Penyertaan Modal Daerah	XX	
	- Kas di kas daerah/Bank		XX
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XX	
	- Ekuitas dana cadangan-Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang		XX
Pembayaran pokok pinjaman (contoh pembayaran utang dalam negeri)	Pengeluaran pembiayaan – Pembayaran pokok pinjaman	XX	
	- Kas di Kas Daerah/Bank		XX
	Bagian lancar utang jangka panjang dalam Negeri	XX	
	- Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran utang jangka pendek		XX
Pemberian Pinjaman Daerah (co: kepada perusahaan daerah)	Pengeluaran pembiayaan – Pemberian pinjaman	XX	
	- Kas di Kas Daerah/Bank		XX
	Pinjaman Kepada perusahaan daerah	XX	
	- Ekuitas Dana Lancar – cadangan kerugian Piutang		XX

Sumber: Data Olahan, 2015

6. Akuntansi Pembiayaan Neto

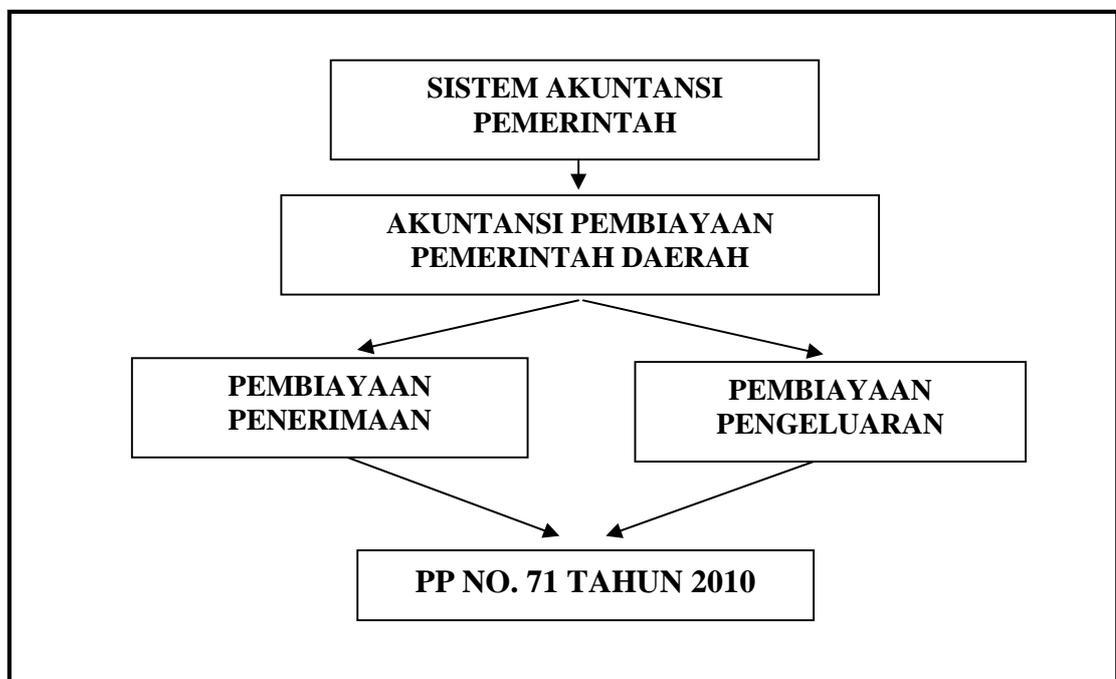
Menurut PP Nomor 71 tahun 2010 Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

Menurut PP Nomor 71 2010 SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

- 1) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- 2) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

2.2 Definisi Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber: Data Olahan, 2015

Deskripsi Konseptual :

Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

Pembiayaan pemerintah daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Transaksi pembiayaan terbagi atas penerimaan pembiayaan dan pembiayaan pengeluaran. Selisih dari kedua transaksi tersebut merupakan pembiayaan netto

PP NO. 71 TAHUN 2010 merupakan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

2.3 Fokus Penelitian

Yang menjadi Fokus penelitian pada penelitian ini penulis ingin mengetahui penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan pada Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

2.4 Data Yang Diperlukan

Data yang diperlukan untuk mendukung proses penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu Data Kualitatif dan data Kuantitatif.

1. Data kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data berupa angka-angka. Dalam penelitian ini data kuantitatif adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado.

2. Data kualitatif

Data yang bersumber dari pemerintah yang disajikan dalam bentuk uraian, berupa struktur organisasi dan uraian tugas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini menjelaskan bagaimana penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan yang terjadi di objek penelitian. Melalui hasil wawancara, Observasi dan Studi kepustakaan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di SKPKD Pemerintah Kota Manado yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang bertempat di Kompleks Kantor Gubernur Sulut Jl. 17 Agustus Kota Manado Lt. 1 Provinsi Sulawesi Utara Telp/Fax. +62 431 843845 – 865461 Email: bpkbmd.sulut@yahoo.com Website : bpkbmd.sulutprov.go.id. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan.

3.3 Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diambil langsung dari SKPKD Pemerintah Kota Manado yang merupakan obyek penelitian penulis dalam melakukan penelitian.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literatur–literatur yang ada atau buku–buku yang berupa dokumentasi dari perpustakaan yang digunakan sebagai acuan teoritis dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi melalui buku–buku, literature, serta jaringan internet yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan merupakan langkah–langkah pengumpulan data yang ditempuh penulis secara langsung dari Lokasi Penelitian, antara lain :

- a. Wawancara, wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bagian–bagian yang berkepentingan dan terlibat langsung dengan masalah yang akan dibahas.
- b. Observasi, penulis langsung meninjau tentang sistem kerja, terutama yang berhubungan dengan proses akuntansi pembiayaan daerah.
- c. Pengamatan prosedur atau kebijakan mengenai Sistem Akuntansi Pembiayaan Daerah yang dilaksanakan pada Pemerintahan kota Manado.

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian secara keseluruhan.
3. Mempelajari dan Mengolah data yang diterima dari objek penelitian
4. Membandingkan hasil yang diperoleh dengan teori yang ada
5. Menarik kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap sistem pembiayaan yang berupa penerimaan dan pengeluaran pembiayaan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD), serta perlakuan akuntansi pembiayaan maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) untuk sistem penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2008, namun masih terdapat hambatan dari segi waktu yang kurang efisien untuk pembukuan penerimaan pembiayaan. Kemudian keterlambatan dalam penerbitan SP2D dimana dokumen-dokumen terkait belum memenuhi syarat sehingga memerlukan tindak lanjut untuk pengujian.
2. Perlakuan akuntansi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan mulai dari pengakuan, pencatatan, pengungkapan secara garis besar sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II, namun masih saja ada terdapat kekurangan dan kelemahan pada pencatatan laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD), khususnya adanya kesalahan pencatatan pada pos SILPA.

5.2 Rekomendasi

Dilihat dari kesimpulan diatas penulis mengemukakan beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan sebagai masukan yaitu :

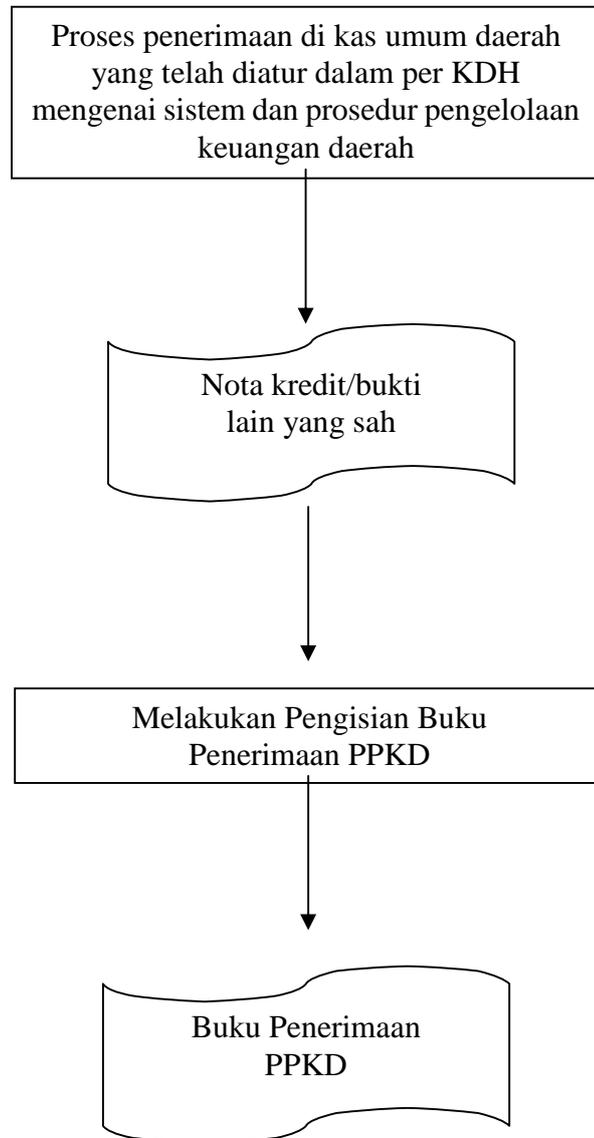
1. Perlu adanya peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam proses transaksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal ini untuk penempatan petugas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan harus memiliki tanggungjawab yang tinggi terhadap tugasnya agar mereka dapat menggunakan waktu yang diberikan dengan tepat.

-
2. Dalam proses pencatatan perlu melakukan evaluasi untuk setiap transaksi yang di catat dalam laporan keuangan realisasi anggaran, misalnya seperti petugas pencatat laporan keuangan sebaiknya lebih teliti dalam melakukan pencatatan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan dalam hal ini laporan realisasi anggaran.

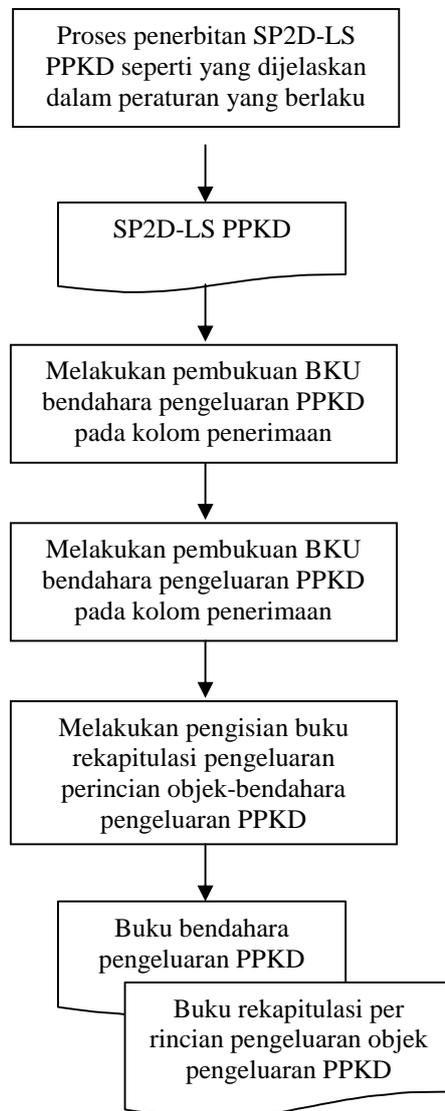
DAFTAR PUSTAKA

- Darise Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Indeks, PT. Indeks. Jakarta. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. Kusufi, Muhammad Syam 2012. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Kedua. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Audi. Yogyakarta.
- Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Penerbit Refika Aditama. Bandung.
- Tanjung, Abdul Hafis. 2009. Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Untuk SKPKD dan Pemerintah Daerah. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008. Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.
- _____, Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah.
- _____, Undang - undang No.33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- _____, Surat Edaran 900/316/BAKD. 2007. Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

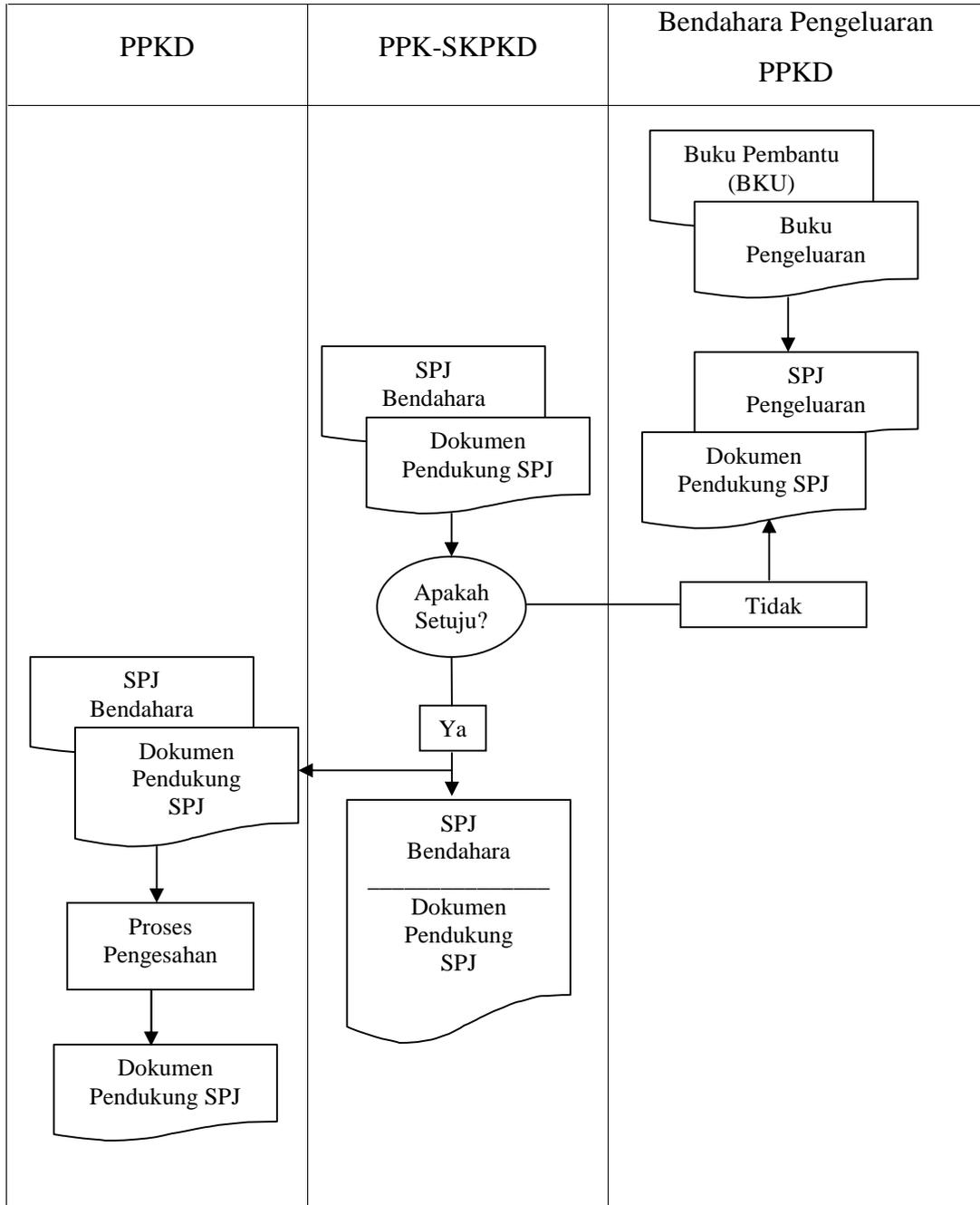
Flowchart Pembukuan Bendahara Penerimaan PPKD



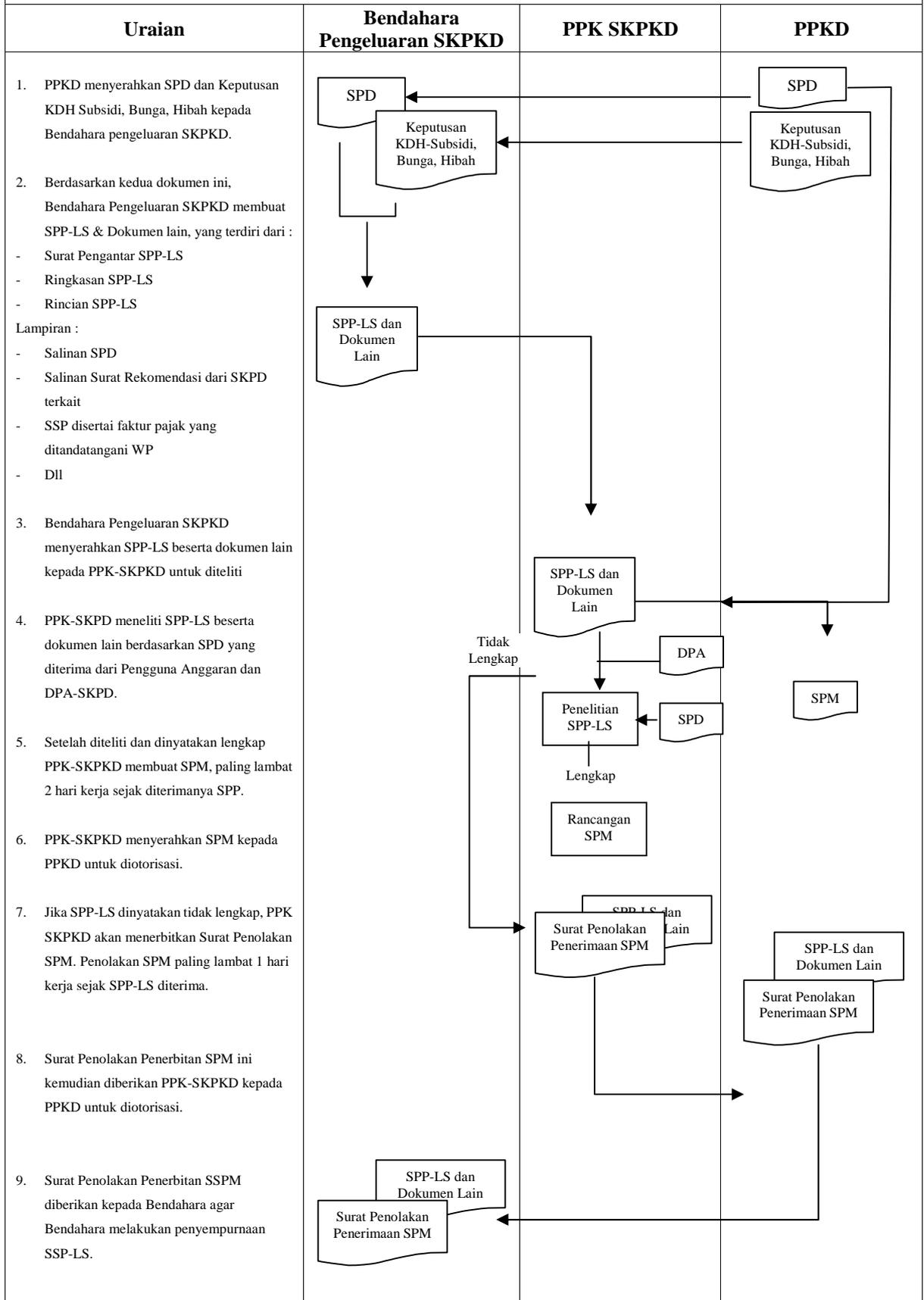
Flowchart Pembukuan Bendahara Pengeluaran PPKD



Flowchart Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD



B.11.1 Pengajuan SPP-LS-Subsidi, Bunga, Hibah, Bantuan, Bagi Hasil dan Pembiayaan



B.11.2 Penerbitan SP2D-LS-Subsidi, Bunga, Hibah, Bantuan, Bagi Hasil & Pembiayaan

Uraian	Bend. Pengeluaran SKPKD	Kuasa BUD	PPKD	Bank
<p>1. PPKD menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD.</p> <p>2. Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM.</p> <p>3. Jika dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2 paling lambat 2 hari kerja sejak pengajuan SPM diterima. Kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran - Bukti-bukti Pengeluaran yang sah dan lengkap <p>4. Kuasa BUD menyerahkan Sp2D kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD dan PPKD</p> <p>5. Sedangkan BUD sendiri harus mencatat SP2D dari Nota Debet ke dokumen Penatausahaan</p> <p>6. Bendahara Pengeluaran SKPKD mencatat SP2D ke dalam Dokumen Penatausahaan yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BKU Pengeluaran - Buku Pembantu Simpanan/Bank - Buku Pembantu Pajak - Buku Pembantu Panjar - Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek <p>7. PPKD mengotorisasi SP2D dan menyerahkannya kepada Bank.</p> <p>8. Apabila SPM dinyatakan tidak lengkap, Kuasa BUD menerbitkan surat penolakan penerbitan SP2D paling lambat 1 hari kerja sejak SPM diterima.</p> <p>9. Surat Penolakan Penerbitan SP2D ini diserahkan kepada Pengguna Anggaran agar dilakukan penyempurnaan SPM.</p>				

B.11.3 Pembelian Dana Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Bagi Hasil dan Pembiayaan

Uraian	Pihak Ketiga	Bank
<p>1. Berdasarkan SP2D yang diterima, Bank mencairkan dana dan membuat Note Debet. Nota Debet ini kemudian diserahkan kepada Kuasa BUD.</p> <p>2. Bank membayar/mentransfer uang kepada Pihak Ketiga.</p>	<p>Dari Kuasa BUD</p> 